

MELIHAT FENOMENA POLARISASI DI MEDIA SOSIAL PADA TAHUN POLITIK

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :

No. Panggil :

Tahun Politik untuk memilih para calon pimpinan bangsa telah tiba. Momentum pemilihan umum (Pemilu) 5 tahunan yang dilaksanakan dengan prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) ini merupakan bagian dari ciri negara demokrasi yang dianut Indonesia. Sudah seharusnya seluruh masyarakat ikut merayakan pesta demokrasi dengan penuh kegembiraan bukan justru malah timbul kebencian dan perpecahan.

Kita semua punya hak dan kewajiban untuk turut serta menjaga agar situasi dan kondisi demokrasi yang bermartabat di tahun politik ini dapat berjalan dengan baik hingga nantinya nama calon terpilih akan diumumkan dan ditetapkan secara sah.

Agar suhu politik tidak menimbulkan gejolak ancaman kebencian dan perpecahan, ada baiknya kita berkaca pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi DKI Jakarta 2017 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), polarisasi nyata dan sangat masif terjadi di media sosial. Sayangnya, polarisasi ini malah menimbulkan keresahan karena memecah belah masyarakat dengan masuknya isu SARA (Suku, Agama dan Ras dan Golongan) yang dibalut aroma kebencian dan permusuhan. Hal ini harus diwaspadai, jangan sampai pesta demokrasi justru menjadi ajang disintegrasi sosial dan politisasi identitas.



Agar pembaca dapat memahami fenomena polarisasi di media sosial dan bagaimana ancamannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun politik ini terjadi, Tim Media Kita telah berkesempatan mewawancarai seorang pengamat Intelijen dan Terorisme yang juga merupakan Dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Riyanta, M.Si. Berikut percakapan tanya jawab redaksi Media Kita dengan beliau.

Bagaimana Anda melihat potensi terjadinya polarisasi di media sosial di tahun politik ini? Seberapa besar hal ini akan terjadi di Indonesia?

Polarisasi merupakan sebuah keniscayaan. Di negara besar demokrasi seperti Amerika Serikat, polarisasi pun terjadi. Polarisasi itu tidak bisa hindari. Polarisasi di media sosial terjadi di Indonesia, kita bisa lihat parahnya dampak dari polarisasi itu sampai adanya ungkapan cebong dan kampret.



BNPT juga terus menggalakan program yang menyebarkan benih pesan-pesan perdamaian dan kebersamaan, seperti melalui Dialog Kebangsaan, Warung NKRI, implementasi RAN PE, dan ragam program lembaga lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin menyadari pentingnya memperkuat Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah-langkah yang dilakukan terus diperkuat terutama dalam menghadapi tahun politik dengan tujuan untuk dapat memperkuat kesadaran dan identitas kebangsaan yang lebih kuat di kalangan masyarakat, serta dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Selama tahun politik, berbagai macam isu dan perbedaan pandangan politik dapat timbul dan memunculkan perpecahan di antara masyarakat. Oleh karena itu, dengan memperkuat Wawasan Kebangsaan, masyarakat dapat lebih mampu memahami perbedaan pendapat yang ada dengan cara yang lebih bijak dan damai, serta lebih fokus pada kepentingan bersama sebagai bangsa.

Kepala BNPT berharap agar semua elemen bangsa bisa mempertahankan kerukunan dan keharmonisan yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia di tengah ragam perbedaan yang ada. Bangsa Indonesia harus mampu membuktikan diri dengan menahan untuk terjerembab dalam ragam kubangan godaan yang bersifat destruktif, termasuk polarisasi yang dipicu sentimen politik identitas.

"Salah satu ikhtiar kami dengan tugas-tugas di dalam pencegahan intoleransi radikal yang mengarah kepada terorisme, kita upayakan di tahun politik ini bisa saling bertukar pikiran dan berbagi dengan tetap berpegang teguh kepada platform kebangsaan kita yang berdasarkan konstitusi negara, UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila," kata dia.



Nah sebenarnya yang perlu kita kelola dari fenomena polarisasi itu sendiri adalah dampaknya. Perbedaan dengan adanya polarisasi itu wajar dan *gak* salah, perbedaan itu wajar. Perbedaan itu hal yang sudah biasa di Indonesia. Polarisasi perbedaan antar kutub kan yang *gak* boleh itu dampaknya supaya tidak berakibat permusuhan dan kebencian. Jika orang yang berbeda itu dianggap salah, dihinakan (dehumanisasi), dibenci, dimusuhi, ini yang tidak boleh terjadi. Apalagi ketika dampaknya itu menimbulkan kekerasan yang kemudian menjadi aksi teror. Tidak boleh juga ketika orang menggunakan identitas SARA-nya di dalam hajat politik sehingga mengakibatkan terjadinya perendahan derajat manusia lain yang dianggap berbeda ini yang *gak* boleh.

Di tahun politik ini, praktik menjual identitas untuk meraih simpati pemilih harus direduksi. Karena bukan ini yang diperlukan dalam demokrasi kita sebenarnya, saya lihat ini adalah kegagalan parpol dalam memunculkan kadernya yang berkualitas, kalau kadernya berkualitas dia tidak akan jualan SARA, dia jualan program, jualan konsep sehingga orang yakin akan memilih karena orang ini memang berkualitas karena orang ini baik, punya konsep pengembangan yang baik, makanya dia yang dipilih. Bukan semata-mata identitas.

Sementara itu BNPT RI pun harus sangat mewaspada momentum tahun politik ini. Kelompok-kelompok radikal terorisme mempunyai banyak misi pada tahun politik ini termasuk memanfaatkan politik identitas dan polarisasi di media sosial dalam rangka menyebarkan ideologi kebencian dan kekerasan kepada masyarakat. Di satu sisi BNPT harus mewaspada bagaimana kelompok radikal ini ingin orang-orang mereka dapat eksis sehingga mereka bisa menggapai tujuan mereka.

Media sosial di tahun politik sangat potensial menjadi saluran propaganda-propaganda, doktrinasi bahkan infiltrasi dari kelompok-kelompok radikal teroris. Mereka melakukan radikalisasi secara acak dengan menyebar konten di manapun di internet. Inilah yang dilakukan oleh ISIS. Netizen di berbagai dunia bergabung dengan ISIS tanpa pernah bersentuhan dengan siapa pun. Bahkan ada orang yang melakukan aksi teror hanya karena melihat konten-konten yang berakibat adanya aksi *lone-wolf* di Indonesia dimana mereka terpapar paham radikal terorisme melalui apa yang disebut dengan *self radicalization*.



Siapa yang akan menjadi korban dan paling dirugikan dengan dampak polarisasi yang menggunakan isu SARA di media sosial ini



Korban yang paling dirugikan tentunya adalah masyarakat. Yang nantinya negara Indonesia sendiri yang akan merugi. Negara kita jadinya berdemokrasi akan unsur-unsur identitas SARA itu sendiri bukan demokrasi yang berkualitas karena kompetensi. Ketika identitas SARA ini yang ditonjolkan dibandingkan dengan penyampaian gagasan, program, dan konsep, nantinya masyarakat malah cenderung memilih dengan alasan yang identitas SARA-nya sama dengan calon-calon tersebut.

Di Tahun 2023 ini dengan 5 vaksin kebangsaan, BNPT RI akan fokus dengan program Penguatan Wawasan Kebangsaan. Apakah program dapat mengurangi/menghilangkan polarisasi dan politik SARA di media sosial?



Dalam penguatan wawasan kebangsaan yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah seberapa kuat wawasan kebangsaan anak muda yang merupakan pengguna media sosial terbesar di Indonesia ini. Harus ada pemetaan terlebih dahulu. Setelah itu akan tahu jika ada gap antara kondisi riil-nya dan nilai idealnya berapa. Jika ada gap, di situlah BNPT harus masuk menguatkan wawasan kebangsaan dari aspek bahaya masuknya pengaruh ideologi kekerasan.


Dalam menguatkan wawasan kebangsaan, BNPT harus bisa memberikan informasi secara jelas, ini loh ideologi-ideologi kekerasan. Ciri-cirinya seperti apa, kemudian bagaimana ideologi kekerasan ini sering dibungkus dengan narasi-narasi agama. Orang-orang dan akun media sosial yang mengampanyekan ideologi kekerasan ini harus ditindak tegas dan diketahui juga oleh anak muda agar tidak diikuti.

Dalam menguatkan wawasan kebangsaan, BNPT RI tidak bisa bekerja sendiri harus ada kolaborasi juga dengan badan/lembaga/pemerintahan lainnya. Seperti dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jika BNPT ini memberikan edukasi kepada anak muda, ideologi yang *gak* boleh itu seperti apa, dampak buruknya seperti apa, bagaimana cara harus menghindarinya *nah* BPIP yang memberikan edukasi mana yang boleh, manfaat dan dampak baik dari ideologi kita apa saja. BNPT mengedukasi ini yang dilarang itu seperti apa, sementara BPIP memberitahukan apa yang dibolehkan.

Bagaimana kita (khususnya lembaga negara dalam hal ini BNPT RI) dalam mencegah terjadinya dampak polarisasi di media sosial yang berpotensi memecah belah bangsa di tahun politik?



Kita harus membangun kesadaran kepada seluruh warga negara bahwa perbedaan adalah hal yang biasa, demikian pula perbedaan politik adalah hal yang biasa. ketika nanti sudah selesai (Pemilu) ya sudah, kita jadi warga negara yang jadi satu lagi. Kemudian, penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus jeli ketika ada penghinaan kepada martabat (berkaitan dengan polarisasi dan politik identitas) orang lain, hal yang seperti ini harus disempit (ditindak tegas). Kepada aktor politik juga harus didorong dan kita harapkan akan mengisi media sosial dengan adu gagasan, adu konsep dan adu program. Masyarakat pun nantinya dapat menguji kualitas masing-masing program yang disampaikan di media sosial



Bagaimana pelibatan anak muda Indonesia dalam rangka menangkal dampak negatif polarisasi di media sosial pada tahun politik?

Saya rasa anak muda Indonesia sangat terbuka untuk membangun negaranya. Tinggal bagaimana kita mampu membangun *enviro*-nya. Bagaimana kita membangun *enviro* tersebut, pertama kita harus melakukan pendekatan yang tepat kepada anak muda. Misalnya saat ini mereka sebagian besar sudah mahir membuat konten dan juga *vlog*. Nah dengan keahlian mereka dibidang digital ini harus jadi perhatian pemerintah. Sebagai contoh ajak mereka dalam lomba membuat konten persatuan dan kesatuan, cinta tanah air misalnya, kemudian hadiahnya yang anak muda sukai misalnya kita berikan *handphone Iphone*. Jadi dalam mengajak anak muda agar bisa terlibat dan menjadi benteng pertama pencegahan masuknya ideologi transnasional, pilih dan jalankan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian anak muda Indonesia itu sendiri.

ERA PENCEGAHAN IDEOLOGI KEKERASAN DI PAPUA DIMULAI



”

“Kita ingin dalam penanganan terorisme ini tidak hanya berpikir tentang penindakan, bukan melulu dengan senjata, tapi juga pendekatan-pendekatan lunak karena yang diubah adalah cara berpikir. Penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secaraimbang,”

Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.
Kepala BNPT RI



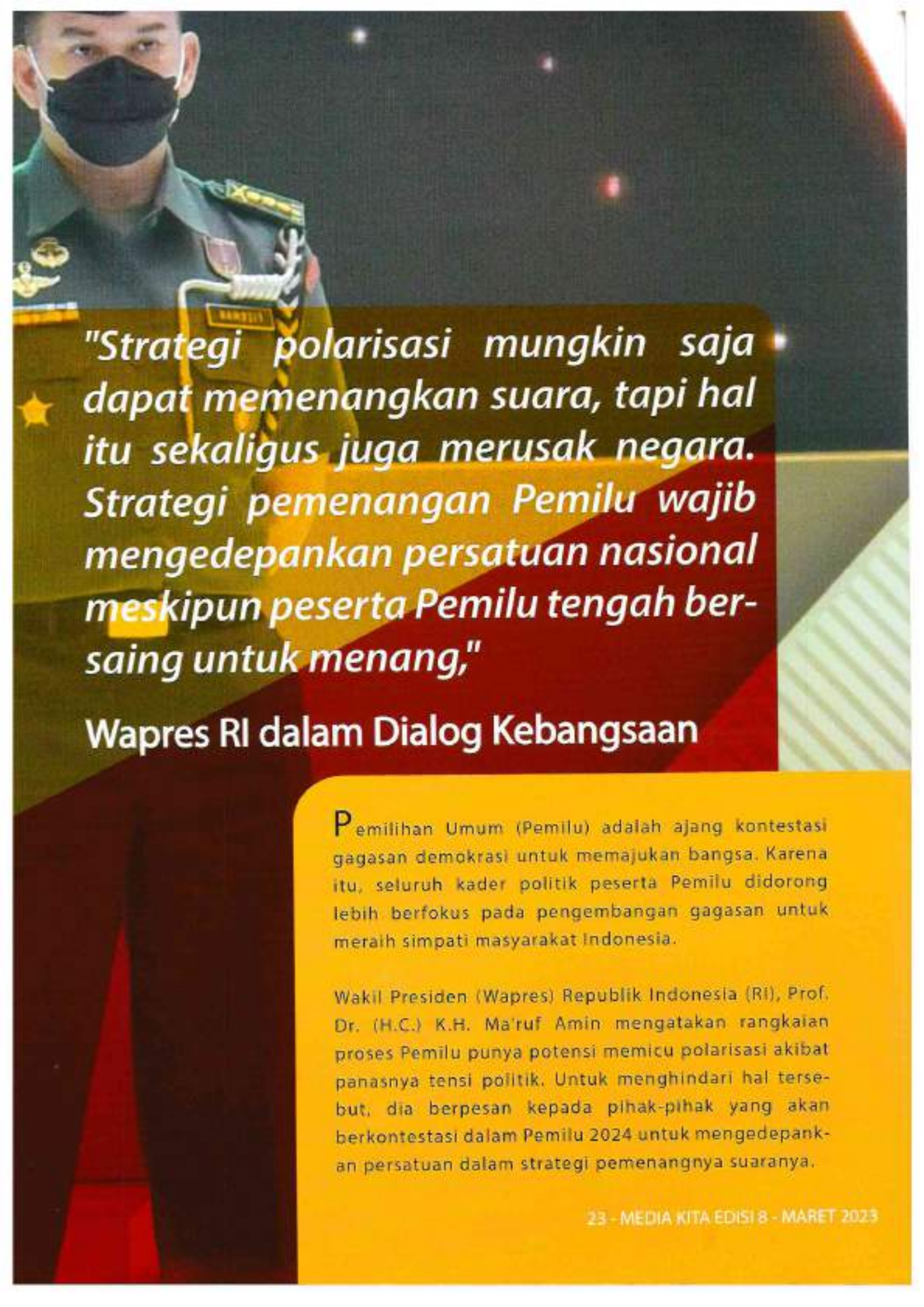
“

Saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik, yang akan mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya demi rakyat Indonesia

”



Wapres RI: Strategi Pemilu Tidak Boleh Korbankan Persatuan



"Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Strategi kemenangan Pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta Pemilu tengah bersaing untuk menang,"

Wapres RI dalam Dialog Kebangsaan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah ajang kontestasi gagasan demokrasi untuk memajukan bangsa. Karena itu, seluruh kader politik peserta Pemilu didorong lebih berfokus pada pengembangan gagasan untuk meraih simpati masyarakat Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan rangkaian proses Pemilu punya potensi memicu polarisasi akibat panasnya tensi politik. Untuk menghindari hal tersebut, dia berpesan kepada pihak-pihak yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 untuk mengedepankan persatuan dalam strategi pemenangnya suaranya.

"Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Strategi kemenangan Pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta Pemilu tengah bersaing untuk menang," kata Wapres dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Senin (13/3).

Dia mengatakan Indonesia sudah pernah mengalami kenangan buruk dalam Pemilu 2019. Alih-alih fokus beradu gagasan dan program-program, yang terjadi justru malah menunjukkan fenomena saling menjatuhkan dengan isu politik identitas. Kondisi tersebut, menurut Wapres, sangat memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif, karena berpotensi memecah belah bangsa.

"Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi. Tentunya kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk Pemilu yang lalu. Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah kita agar Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang aman, damai, dan berkualitas," ujar Wapres.

Dia menegaskan kampanye Pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peserta Pemilu didorong berfokus pada keunggulan program untuk kemajuan bangsa sekaligus menghindari instrumen apapun yang berpotensi membuat retak bangunan persaudaraan Bumi Pertiwi.

Wapres juga meminta semua pihak untuk mewaspadaikan gerakan kampanye negatif di media sosial. Kepada BNPT, dia berpesan untuk mewaspadaikan pihak-pihak yang hendak memanfaatkan momen hajat Pemilu untuk mendelegitimasi Pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu SARA, apalagi tindakan kekerasan terorisme.





"Saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik, yang akan mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya demi rakyat Indonesia,"

- K.H. Ma'ruf Amin

"Kita juga ingin melakukan pencegahan di dalam sosial media ini agar tidak menjadi ajang untuk menebar kebencian, melempar hoaks, melempar permusuhan, propaganda, sehingga semua dalam kontestasi pesta demokrasi yang akan datang, narasi-narasi itu diharapkan tidak menjadi bagian yang dipilih dalam rangka meraih simpati,"

Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, M.H.



BNPT sendiri memiliki sejumlah rencana program yang berfokus untuk mencegah terjadinya perpecahan dan intoleransi yang berpotensi muncul akibat panasnya tensi politik menghadapi hajat elektoral empat tahunan tersebut. BNPT gencar merangkul berbagai elemen bangsa untuk terlibat dalam Dialog Kebangsaan serta Penguatan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat narasi-narasi kebangsaan.

"Karena ini adalah tahun politik, kami sangat mempromosikan program dan narasi dalam rangka mencegah polarisasi, terutama berkaitan dengan narasi-narasi yang mengangkat identitas tertentu. Apakah identitas suku, agama, golongan, ras, karena Indonesia isinya adalah perbedaan-perbedaan itu," kata Kepala BNPT RI Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

Boy Rafli juga mengajak semua pihak untuk mengantisipasi model-model kampanye negatif yang memicu disintegrasi di media sosial. Menurutnya, Indonesia memiliki 270 juta penduduk. Sebanyak 207 juta diantaranya merupakan pengguna internet. Dari 207 juta itu, 80% adalah para pengguna media sosial. Dan pengguna media sosial yang dominan adalah kalangan generasi muda.

RUANG KERJA

Penguatan Deradikalisasi
Berbasis Kesejahteraan,
BNPT RI Bertolak ke Arab
Saudi Pelajari Banyak Hal

